

# **Dinamika Politik Keagamaan di Indonesia.**

Tinjauan Gerakan Ekstrem FPI

Oleh: Marsus, M.Hum  
*IAIN Surakarta*  
marsus20@gmail.com

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas mengenai perkembangan politik keagamaan pada era Reformasi. Sebelumnya organisasi keagamaan sulit berkembang karena mendapat tekanan kuat dari pemerintah Orde Baru. Berakhirnya Orde Baru ke Reformasi menjadi angin segar bagi kelompok-kelompok tertentu yang semula sudah menyiapkan dasar-dasar organisasinya. Salah satunya adalah Fron Pembela Islam (FPI). Spirit gerakan tersebut didasari atas kekhawatiran akan terkikisnya nilai-nilai keislaman seiring perkembangan dan kemajuan zaman, sehingga mereka beranggapan perlu adanya perisai untuk menjaga supaya masyarakat tetap eksis dalam penegakan nilai-nilai keislaman sesuai yang terkandung dalam al-Quran.

Terlepas dari ideologi dan spirit nilai-nilai keislaman, di sisi lain gerakan-gerakan FPI cenderung diwarnai dengan aksi-aksi provokatif dan anarkis. Sehingga disinyalir gerakan tersebut bukan saja organisasi keagamaan semata, melainkan sebagai motor politik untuk menghimpun massa dalam kepentingan politik tertentu.

**Kata kunci: Politik Keagamaan, FPI**

## **Abstract**

This paper discusses the development of religious politics during the Reformation era. Previously, it was difficult for religious organizations to develop because there is strong pressure from the Orde Baru government. The end of the Orde Baru government to Reformasi became a good news for certain groups that had originally prepared the basics of their organization. One of them is the Fron Pembela Islam (FPI).

The spirit of this movement is based on the fear of the erosion of Islamic values along with the development and progress of the times, so they think there is a need for a shield to keep society alive in upholding Islamic values according to Islamic teaching in Koran. Regardless of the ideology and spirit of Islamic values, on the other side, FPI movement tends to be colored with provocative and anarchist actions. So it is supposed out that the movement is not only a religious organization, but as a political motor to gather the masses in certain political decisions.

**Keywords: Religious Politics, FPI**

## A. Pendahuluan

Organisasi keagamaan pada masa Orde Baru tidak mudah berkembang bebas sebagaimana saat ini. Apalagi organisasi-organisasi yang cenderung provokatif dan radikal. Pemerintah senantiasa menekannya agar tidak tumbuh subur. Namun, setelah kekuasaan Orde Baru tumbang, diganti dengan Era Reformasi, berbagai organisasi keislaman mulai muncul. Benih-benih yang sebelumnya terpendam tumbuh dan berkembang. Organisasi keislaman semakin mewarnai gerak politik keagamaan sampai saat ini.

Munculnya organisasi-organisasi tersebut bukan tanpa alasan. Faktor-faktor yang mendorong salah satunya adalah spirit nilai-nilai keislaman, karena anggapan mereka bahwa masyarakat Indonesia pada zaman modern akan menghadapi tantangan nilai dan perilaku normatif Islam yang diajarkan dalam al-Quran akan terkikis.

Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini akan mengulas tentang perkembangan gerakan politik dan organisasi keagamaan di era Reformasi, salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI). Hal ini penting ditelisik karena belakangan sering menui kontroversi. FPI sebagai gerakan keagamaan yang berlandaskan *amar ma'ruf nahi mungkar*, berhasil memobilisasi massa yang dalam praktiknya sering diwarnai dengan aksi-aksi anarkis dan dianggap merugikan pihak lain.

Terlepas dari ideologi dan spirit keislaman, di sisi lain FPI disinyalir sebagai motor politik untuk menggerakkan dan menghimpun massanya dalam kepentingan tertentu. Jika organisasi dan gerakan keislaman telah ditunggangi kepentingan politik, maka yang menjadi ancaman adalah masa depan Islam Indonesia. Oleh karena itu, adanya gagasan dan sikap gerakan politik keagamaan menarik untuk dikaji.

## B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.<sup>1</sup> atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>2</sup>

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan bagaimana metode pengembangan dinamikan Politik dan keagamaan di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 2.

<sup>2</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 60.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perkembangan Organisasi Keagamaan Masa Reformasi

Organisasi keagamaan Islam Indonesia zaman kontemporer, sering diwarnai dengan kemunculan gerakan-gerakan radikal-fundamental. Gerakan ini mulai tumbuh saat jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998. Dibawah semangat reformasi, muncullah kesempatan bagi tokoh muslim untuk tampil dengan agenda ajaran-ajaran keislaman agar dapat masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Organisasi tersebut salah satunya diwakili oleh Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan di beberapa segi tertentu juga gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).<sup>3</sup> Sebagian dari organisasi keagamaan ini memiliki cita-cita dan spirit untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia.<sup>4</sup>

Sebelum organisasi tersebut menampakkan diri secara terang-terangan, benih-benih itu sebenarnya sudah tertanam jauh hari sebelumnya. Awalnya gerakan tersebut berjalan secara tersembunyi. Baru pada tahun 1990-an dengan ditandai munculnya *halaqah-halaqah* di berbagai kampus dan banyaknya jamaah pengajian dengan model pakaian khas (berjilbab dan berjubah besar, atau dengan ciri khas sorban dan jenggot bagi kaum lelaki), gerakan ini mengekspresikan diri secara terang-terangan.

Pada dekade 1970-an dan awal 1980-an pemerintah Indonesia dengan sikap tegas menumpas gerakan Islam radikal-fundamental. Setiap ada gerakan yang dianggap mengarah pada gerakan ekstrem, sekecil apa pun, pemerintah akan segera melenyapkannya. Hal ini dengan alasan, bahwa pemerintah tidak mau mengambil resiko atas keutuhan bangsa dan negara akan cerai-berai oleh kelompok ekstrem tersebut.<sup>5</sup> Meskipun gerakan Islam radikal waktu itu mendapat tekanan keras agar tidak berkembang, namun masih saja misinya berjalan terselubung. Mereka dengan gerakan-gerakan tersembunyi terus berupaya melakukan visi-misinya untuk melawan kekuatan pemerintah yang dianggapnya banyak tidak sesuai dengan syariat Islam.

Organisasi Islam 'garis keras' ini semakin menampakkan taringnya dan mendapat peluang besar untuk bergerak di era reformasi. Suasana politik yang semakin terbuka pasca tergulingnya Presiden Soeharto, yang ditandai dengan gema euforia demokratisasi Indonesia seperti menjadi angin segar bagi kaum-kaum penganut paham Islam radikal. Bahkan, sejak itu mereka mulai berani menggugat secara terang-terangan keabsahan Pancasila sebagai asas tunggal. Mereka menuntut agar ajaran-ajaran keislaman diekspresikan melalui simbol-simbol formal.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: the Wahid Institut, 2009), 134.

<sup>4</sup> Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2012), hlm. 381-382. Lihat juga dalam Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam...*, hal.96

<sup>5</sup> Al-Zastrouw Ngatawi, *Gerakan Islam simbolik: Politik Kepentingan FPI* (Yogyakarta: LKiS,2006), hlm. 1-2

<sup>6</sup> Simbol-simbol keislaman mulai terang-terangan banyak digunakan di Era Reformasi untuk mengekspresikan kepentingannya, seperti FPI, Brigade Hibullah, Laskar Bulan Bintang, Laskar fi-Sabili, dan Laskar Putih--yang mana kelompok ini tidak bisa muncul di Era Orde Baru. Lihat juga dalam Al-Zastrouw Ngatawi, *Gerakan Islam simbolik: Politik Kepentingan FPI*, hlm. 2-3.

Kelompok ini pada perkembangannya bukan hanya berkuat pada perjuangan nilai-nilai keislaman saja, tetapi mulai ikut melangkah di ranah politik formal. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya partai-partai yang berasaskan Islam, misalnya seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Syariat Islam Indonesia, Partai Masyumi, Partai Keadilan/Partai Keadilan Sejahtera, dan lain-lain. Partai-partai tersebut memiliki spirit dan visi-misi yang tidak jauh berbeda, yaitu untuk menerapkan syariat Islam Indonesia, meski dalam titik tertentu ada yang memberikan penafsiran berbeda terhadap syariat dan pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Munculnya beberapa partai yang berhaluan Islam ini, tidak bisa dipungkiri bahwa ada keterkaitan dengan gerakan ormas Islam yang banyak muncul di Era Reformasi. Cita-cita kelompok Islam yang menginginkan tegaknya nilai-nilai keislaman, tidak cukup dengan gerakan di dalam tubuh organisasi itu sendiri. Mereka mulai melebarkan sayap kekuasaannya ke ranah sosial-masyarakat. Bahkan, jalan politik pun menjadi salah satu pilihan yang dilakukan untuk menarik massa pendukungnya.

Fenomena ini menjadi suatu pembahasan yang tidak pernah habis diperbincangkan, sebab walau bagaimanapun keinginan dan cita-cita menegakkan hukum syariat Islam di Indonesia sering menuai pro dan kontra dari sebagian elemen masyarakat, terutama ketika dibenturkan dengan asas-asas Pancasila dan konteks sosio-antropologis serta kultur masyarakat Indonesia yang beragam. Sehingga, pada perkembangannya pertentangan yang terjadi bukan saja di ranah ideologi, tetapi cenderung dibawa ke ranah politik yang ditandai dengan aksi-aksi massa.

Oleh karenanya, tidak heran apabila baru-baru ini sempat terjadi aksi besar-besaran yang dikenal dengan Aksi Damai 411 dan 212. Genderang aksi yang ditabuh oleh Habieb Rizieq sebagai imam besar FPI diikuti oleh hampir semua elemen masyarakat dan organisasi Islam di Indonesia. Terlepas munculnya gerakan itu apakah murni melawan anggapan atas penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengutip surat al-Maidah: 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, atau ada kepentingan politis dari oknum tertentu agar segera memenjarakan Ahok yang pada waktu itu sedang berkompetisi sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta 2017.

## 2. Munculnya Gerakan Front Pembela Islam

Front Pembela Islam merupakan salah satu organisasi keislaman yang didirikan pada 17 Agustus 1998 oleh seorang sarjana lulusan King Saud University Arab Saudi, Habib Muhammad Rizieq Shihab.<sup>8</sup> Rizieq lahir pada tahun 1965. Ia seorang Indonesia keturunan Arab yang dididik LIPIA Jakarta dan di Arab Saudi pernah berperan dalam perang jihad Afganistan.<sup>9</sup> Organisasi ini berkembang pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, kemudian berlanjut dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm, 3

<sup>8</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 433

<sup>9</sup> Merle Calvin Ricklefs, Moh. Sidik Nugraha, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 722

mewarnai gerakan-gerakan keislaman sejak masa pemerintahan Presiden Habibie hingga sekarang.

FPI mempunyai cita-cita memurnikan akhlak umat manusia dari berbagai pengaruh negatif kehidupan kota-kota metropolitan yang dianggap jauh dari tradisi Islam.<sup>10</sup> Gerakan-gerakan yang dicanangkan oleh FPI sebenarnya menghendaki dakwah Islam agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama perhatiannya kepada masyarakat regional, karena dapat lebih mudah untuk berkompromi. Dengan strategi ini, nilai-nilai Islam yang dianggap sudah memudar dalam kehidupan masyarakat, diharapkan dapat tumbuh berkembang, sehingga cita-cita hukum syariat Islam Indonesia lebih mudah diterima.

Sebelum gerakan ini tersebar luas ke berbagai belahan wilayah Indonesia, pada awalnya FPI masih berkonsentrasi di kawasan Jakarta. Meskipun tidak secara keseluruhan gerakan ini memakai taktik-taktik anarkis, namun karena tindakan-tindakan ekstrem yang sering dilakukan, FPI lebih dikenal dengan gerakan yang cenderung menggunakan cara kekerasan. Gerakan-gerakan ekstrem inilah yang kemudian sering menjadi fenomena aktual bagi kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan, tindakannya menjadi ancaman bagi masyarakat di luar lingkup gerakannya, terutama bagi kelompok tertentu yang dianggap hidup dalam kungkungan maksiat oleh pandangan FPI, seperti tempat diskotik, hiburan malam, tempat-tempat peredaran minuman keras atau narkoba, dan lain sebagainya.

Bukan saja tempat-tempat atau lokasi tersebut yang menjadi sasaran gerakan FPI, kelompok religius lain yang tidak sejalan dengan pandangan, visi-misi dan spirit organisasi yang diketuai Rizieq Syihab tentang Islam--tidak luput dari teror kekerasannya, misalnya seperti kelompok Ahmadiyah. Sehingga tidak heran bila Ahmad Syafii Maarif selaku ketua Muhammadiyah mengolok-olok FPI sebagai "preman berjubah."<sup>11</sup>

Bagi pengikut organisasi FPI, perilaku-perilaku seperti disebutkan di atas merupakan tindakan maksiat yang dilarang oleh Islam dan harus dimusnahkan. Seolah-olah kelompok ini tidak melihat bagaimana dari sisi keberagaman dan kemanusiaan. Pandangan FPI melalui *nahi mungkar* yang sering dijadikan landasan dalam gerakannya, ketika menjumpai tindakan semacam itu, tentu tidak boleh tidak harus dicegah dan ditumpas, apa pun yang menjadi alasannya. FPI dalam mengambil sikap tidak segan-segan bertindak anarkis terhadap golongan masyarakat lain yang dianggap melanggar aturan-aturan Islam.

Di dalam tubuh internal FPI memiliki kelompok Laskar Pembela Islam. Kelompok ini bertindak sebagaimana sosok 'militer' yang sering menuai kontroversi. Ia sering melakukan aksi-aksi kekerasan ketika melakukan razia penertiban atau pencegahan kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sampai saat ini FPI merupakan salah satu organisasi Islam yang tumbuh dan berjalan begitu pesat. Termasuk dalam menghimpun masyarakat ikut serta masuk ke dalam barisannya. Organisasi ini mengklaim sudah punya cabang di 16

---

<sup>10</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia...*, hlm. 437

<sup>11</sup> Merle Calvin Ricklefs, Moh. Sidik Nugraha, *Sejarah Indonesia Modern...*, hlm. 722

provinsi, dengan total keanggotaan 10 Juta orang. Di Wilayah Jakarta sendiri, keanggotaannya diklaim mencapai 50.000 orang.<sup>12</sup>

### 3. Dinamika Gerakan Politik Keagamaan

Munculnya FPI sebagai salah satu organisasi keagamaan, pada perkembangannya bukan hanya bergerak dalam lingkup organisasi Islam saja. Pasca tumbangannya Presiden Soeharto, FPI disinyalir juga ikut andil dalam carut-marut dunia perpolitikan. Hal itu dilihat dari gerak dan tindakan FPI yang cenderung dekat pada kelompok-kelompok pemerintahan dalam menjalankan kepentingannya.

FPI yang berkembang pesat pada masa kekuasaan Presiden Habibie, dinilai dekat dengan orang-orang Soeharto. Pada masa Prabowo Subianto aktif sebagai TNI, FPI diduga sebagai salah satu binaannya. Tetapi, setelah kekuasaan Soeharto jatuh, FPI dekat dengan kelompok Jendral Wiranto yang tengah berseteru dengan Prabowo.<sup>13</sup>

Pandangan ini juga dijelaskan oleh George Junus dalam buku, *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga*, bahwa dukungan pertama untuk FPI diduga keras berasal dari Jenderal Wiranto, selaku Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata selama kepresidenan Habibie. Pelaksanaan kebijakan Wiranto adalah Kivlan Zein, Kepala staf KOSTRAD, Djaja Suparman, KASAD Nugroho Djajusman, dan Kapolres Jakarta. Mereka menciptakan apa yang disebut "bantuan penjagaan keamanan pribadi" untuk membela sidang khusus MPR yang melegitimasi presiden Habibie November 1998. Sejak saat itu, Wiranto, Djaja Superman, dan kawannya dipercaya sebagai pihak utama pemberi bantuan politik FPI.<sup>14</sup>

Tindakan-tindakan semacam ini secara tidak langsung sebagai suatu strategi gerakan timbal balik untuk saling memanfaatkan yang dilakukan untuk melebarkan misinya. Dengan kedekatan terhadap pemerintah, pada saat itu pula FPI akan dengan mudah menjalankan keinginannya. Baik dalam politik keagamaan maupun politik praktis.

Keterkaitan dan hubungan FPI dengan Wiranto juga dapat dilihat dari aksi ratusan milisi FPI ketika menyatroni kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham), memprotes atas pemeriksaan Jenderal Wiranto oleh KPP HAM. Milisi FPI yang datang ke kantor Komnas Ham menuntut hak asasi manusia dibubarkan, karena dianggap lancang memeriksa para jenderal.<sup>15</sup> Tindakan untuk membubarkan Komnas Ham yang dilakukan kelompok FPI tersebut seolah-olah hanya menjadi alat penggerak dari kepentingan pihak Wiranto, dan disisi lain FPI akan mendapatkan posisi dalam menjalankan misinya.

---

<sup>12</sup> George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 84

<sup>13</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam dari Indo hingga Nigeria* (Yogyakarta, Pustaka alvabet, 2004), hlm. 74

<sup>14</sup> George Junus Aditjondro, *Korupsi kepresidenan: reproduksi oligarki berkaki tiga...*, hlm. 84

<sup>15</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam dari Indo hingga Nigeria* (Yogyakarta, Pustaka alvabet, 2004), hlm. 74

Sementara itu kedekatannya dengan ABRI dapat dilihat dalam aksi demonstrasi tandingan yang dilakukannya melawan aksi mahasiswa yang menentang RUU keadaan darurat/RUU PKB yang diajukan Mubes TNI kepada DPR pada Oktober 1999. Setelah Wiranto jatuh, kelompok FPI seperti kehilangan induknya dan mulai mengalihkan perhatian pada penegakan syariat hukum Islam.<sup>16</sup>

Dalam konstelasi politik keagamaan, pemikiran yang dianut FPI menunjukkan perhatian pada bentuk-bentuk politik Islam, yang memiliki keterkaitan pada munculnya partai-partai Islam. Umumnya partai-partai tersebut mengekspresikan simbol-simbol yang bernuansa Islam untuk mempengaruhi masyarakat dan ekspresi ketatanegaraan Islam.<sup>17</sup> Dengan begitu, para pendukung gerakan ini kemudian menekankan ideologi atau politiknya yang mengarah pada simbolisme keagamaan.

Selain gerakan-gerakan politis yang disebutkan di atas, dimensi lain gerakan FPI yang sering menuai sorotan publik yaitu dalam aksinya melakukan pengrusakan dengan cara-cara kekerasan dalam menyikapi persoalan yang dianggapnya maksiat. Dengan perilaku demikian, wajar saja kalau masyarakat menilai bahwa FPI bukanlah murni sebagai ormas Islam semata yang menjunjung nilai dan syariat keislaman. Akan tetapi, ia dibarengi oleh kepentingan politis yang digerakkan oleh oknum tertentu.

#### **4. Sikap Elite Politik dan Agama**

Terwujudnya Indonesia yang damai menjadi harapan bagi semua elemen masyarakat. Di tengah kemajuan, keberagaman dan multikulturalisme diharapkan agar tercipta suatu kerukunan. Adanya komunitas multikultural yang damai tentunya didukung oleh peran pemerintah yang baik dan tegas. Organisasi dan komunitas-komunitas yang terhimpun semestinya dapat disentralisir secara kokoh. Kontrol pemerintah tidak hanya kepada elite politik, melainkan juga terhadap elite agama demi terciptanya kerukunan. Dengan demikian, pemerintah sebagai sentral kekuasaan suatu negara dapat mengetahui, apa dan bagaimana gejolak yang sedang dialami oleh setiap kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan. Sehingga, sebelum ada gejolak yang benar-benar meledak, pemerintah sudah bisa meredakannya.

Belajar dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi, pemerintah semestinya menelisik lebih jauh terhadap karakteristik organisasi keagamaan yang ada di negara ini. Islam sebagai salah satu agama mayoritas, bukan menjadi alat atau media yang dapat digerakkan sebagai pemicu konflik. Akan tetapi, pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik suatu kelompok dan organisasi keagamaan kiranya dapat menciptakan interaksi kultur mereka secara damai.

Pembinaan dan pengembangan masyarakat, menjadi salah satu hal yang penting dilakukan. Tujuannya untuk membentuk sebuah masyarakat yang damai dan saling menghargai satu sama lain. Semestinya tokoh-tokoh agama dapat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 74-78

<sup>17</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga: 2007), hlm. 156

membina masyarakat regional dengan baik, tanpa perlu ikut terjun ke panggung politik. Para elite politik dan elite agama mesti berjalan imbang pada masing-masing peran dan tugasnya. Elite politik tidak lepas kendali dari kewajibannya, begitu juga pemuka agama dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan. Ia sebagai bagian terpenting dalam menyokong kemajuan masyarakat dan negara.

Pada dasarnya tokoh-tokoh agama sebagai aset utama dalam memajukan negara melalui ilmu pengetahuan. Jika belajar dari perkembangan kebudayaan Islam masa Daulah Safawiyah, kemajuan ilmu pengetahuan baik di bidang sastra, filsafat, sains dan lain sebagainya menjadi orientasi pengembangan utama yang dikembangkan di berbagai perguruan tinggi. Sehingga oleh tokoh-tokoh intelektual saat itu, produk pemikirannya lebih banyak dikembangkan atas kepentingan ideologi, sebagai konsekuensi logis dari situasi masanya,<sup>18</sup> bukan untuk kepentingan individu atau politik kekuasaan.

Artinya adalah ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan diajarkan kepada masyarakat bukan sebagai media politik-kekuasaan, melainkan sebagai kepentingan ideologi dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman. Sehingga dengan demikian, pemuka agama dan elite politik akan berjalan beriringan sesuai tugas masing-masing untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

#### **D. Kesimpulan**

Munculnya organisasi keagamaan yang mengusung cita-cita luhur dalam menegakkan nilai-nilai keislaman di Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat. Multikulturalisme dan kemajuan zaman sering diabaikan oleh kelompok paham radikal. Sehingga aksi-aksi atas nama Islam tidak jarang diwarnai dengan anarkisme yang menyalahi aturan hukum kemanusiaan.

Hal itu terjadi salah satunya akibat pandangan sempit atas hukum syariat Islam dan khilafah yang dianggap harus ditegakkan. Terlepas dari adanya kepentingan politis yang mengakomodir kelompok-kelompok keagamaan dalam menjalankan kepentingannya. FPI sebagai salah satu organisasi Islam bukan saja bergerak di bidang kemajuan nilai-nilai keagamaan. Ia juga ikut andil dalam percaturan politik pemerintahan.

Gerakan-gerakan yang dilakukan FPI menunjukkan sikap intoleransi terhadap perbedaan paham keagamaan dan multikulturalisme. Sehingga aksi-aksi anarkis sering terjadi sebagai konsekuensinya. Dan kelompok masyarakat tertentu menjadi ancaman dari gerakan-gerakannya.

Baik kalangan pemerintah maupun tokoh agama semestinya berjalan pada posisi dan fungsinya masing-masing untuk memajukan masyarakat dan negara. Pemerintah dengan tugasnya menjaga sistem ketertiban dan keamanan negara. Sedangkan tokoh agama membina dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan sebagai aset terpenting dalam memajukan masyarakat dan negaranya.

---

<sup>18</sup> Dudung Abdurahman, *Komunitas Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Pertengahan* (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 43-44.





## Referensi

- Abdurahman, Dudung, *Komunitas Multikultural dalam Sejarah Islam Periode Pertengahan*, Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam dari Indo hingga Nigeria*, Yogyakarta, Pustaka alvabet, 2004.
- Burhanudin, Jajat, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta: Mizan, 2012.
- Junus Aditjondro, George, *Korupsi kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Ngatawi, Al-Zastrouw, *Gerakan Islam simbolik: Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga: 2007.
- Syam, Nur, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Wahid, Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: the Wahid Institut, 2009.